



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN



DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARITO SELATAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

TAHUN 2025

Disusun Oleh Distransnaker





**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan ini juga menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pelaksanaan evaluasi kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Pemerintahan Daerah bertolak dan bermuara tujuan EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kinerja

untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Buntok, Pebruari 2025

Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Barito Selatan,

YOGA PRASETIANTO UTOMO, S.STP, MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19780523 1996121 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1 Latar Belakang	1
1.1 Penjelasan Umum	2
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	15
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	15
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
2.1 Capaian Kinerja Makro	35
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	36
BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	42



BAB IV.	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	42
BAB V.	PENUTUP	44
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I P E N D A H U L U A N

1. 1. LATAR BELAKANG.

Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ibukota Barito Selatan terletak di Buntok yang terletak membujur disepanjang Sungai Barito. Sungai ini merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah. Panjang sungai ini mencapai 900 km dengan rata-rata kedalaman 8 m dan dapat dilayari hingga 700 km serta melewati 5 kecamatan dari 6 kecamatan di Barito Selatan.

Ditinjau dari letaknya Kabupaten Barito Selatan dilalui oleh jalan nasional dan menjadi kota perlintasan yang menghubungkan antara Kota



Palangkaraya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) – Kabupaten Pulang Pisau – Kabupaten Kapuas – **Kabupaten Barito Selatan** – Barito Timur – Kota Banjarmasin (Provinsi Kalimantan Selatan). Dengan demikian lokasi Kabupaten ini memiliki lokasi strategis karena adanya pola pergerakan barang dan barang, sehingga menjadi kota transit, baik dari arah Kota Palangkaraya maupun Kota Banjarmasin. Sedangkan dilihat dari letak wilayah dalam kesatuan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan letak dan posisi yang demikian sehingga perkembangan wilayahnya cenderung menuju ke arah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. 1. 1 Penjelasan Umum

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No.6) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 No 101) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244).
2. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara



- Tahun 1953 No 9), sebagai Undang-undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No.1820).
3. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52).
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan EKPPD.
 5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor : 73/2009 Di rubah dengan Permendagri Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Laporan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis posisi Kabupaten Barito Selatan terletak membujur atau memanjang Sungai Barito dengan letak Astronomis pada $1^{\circ} 20' \text{ LU}$ - $2^{\circ} 35' \text{ LU}$ dan 114° BT - 115° BT , dengan luas wilayah 702.009,9 km². Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas sebesar 702.009,90 hektar. Luas wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan 5,75 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Batas Administrasi Daerah.



Batas Administrasi Daerah Kabupaten Barito Selatan adalah wilayah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara, wilayah timur berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten

Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, wilayah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan pembentukan wilayah menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Tengah, luas Kabupaten Barito Selatan adalah 12.664 km². Namun setelah pemekaran pada tahun 2002 luas daerahnya menjadi 8.830 km².

Terkait luas Kabupaten Barito Selatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 seluas 8.830 km², Namun berdasarkan perkembangan kesepakatan tata batas administrasi dengan beberapa kabupaten tetangga, antara lain Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Tengah serta update informasi data spatial secara real luas Kabupaten Barito Selatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan periode tahun 2014-2034 dengan luas wilayah 702.009,9 hektar.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/329/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Barito Selatan seluas 702.009,9 hektar.

Tabel : 1

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	% Terhadap Luas Kabupaten Barito Selatan
1	Jenamas	662,16	9,43
2	Dusun Hilir	1.369,73	19,51
3	Karau Kuala	825,23	11,76
4	Dusun Selatan	1.133,47	16,15
5	Dusun Utara	1.271,64	18,11
6	Gunung Bintang Awai	1.757,86	25,04
	Jumlah	7.020,09	100,00

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Barsel Tahun 2025

2. Tofografis dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan dataran rendah di Kabupaten Barito Selatan berada di sepanjang alur



Sungai Barito yang berkisar antara 0 – 4 meter dari permukaan laut, kecuali wilayah perbukitan yang merupakan daerah berkapur terletak di sebelah timur di Kecamatan Gunung Bintang Awai dan daerah rawa-rawa tersebar di seluruh wilayah.

Pada bagian tengah dijumpai perbukitan dengan variasi tofografi dari landai sampai miring, dengan intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara. Bagian wilayah utara merupakan rangkaian pengunungan dengan dominasi topografi curam, bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Kabupaten Barito selatan berasal dari formasi-formasi geologis yang tergolong tua. Berdasarkan formasi batuanannya, potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran formasi batuanannya terdiri dari : Aluvium, endapan sungai dan laut, wilayah berawa dan bergambut, batuan sedimen yang kaya akan mineral kuarsa. Selain itu terdapat batuan sedimen klasik, mineral kuarsa dengan sedikit material vulkanik, batuan beku, batuan vulkanik tua, menghasilkan tanah yang kaya unsur hara dan batuan metamorf.

c. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi



penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan mata pencaharian.

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN BARITO SELATAN SEMESTER II TAHUN 2025				
No.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		♂ LAKI-LAKI	♀ PEREMPUAN	
1.	JENAMAS	4.601	4.359	8.960
2.	DUSUN HILIR	8.629	8.020	16.649
3.	KARAU KUALA	8.133	7.726	15.859
4.	DUSUN UTARA	8.835	8.182	17.017
5.	GUNUNG BINTANG AWAI	10.450	9.818	20.268
6.	DUSUN SELATAN	30.339	29.443	59.782
	JUMLAH	70.987	67.548	138.535

www.dukcapil.baritoselatankab.go.id [dukcapilbarsel](#) [Dukcapil Barsel](#) [DukcapilBS_officialchannel](#) [@dukcapil.barsel](#)



d. Jumlah Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yaitu urusan wajib non pelayanan dasar Ketenagakerjaan dan Pilihan urusan Transmigrasi.

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Satuan kerja perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan yang membawahi beberapa Bidang dan Seksi/Subbag yaitu sebagai berikut :

- Sekretariat membawahi 2 Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Perencanaan Keuangan.
- Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi 3 Seksi yaitu : Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi, Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;



- Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, membawahi 3 Seksi yaitu : Seksi Pengupahan dan Jamsosek, Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial dan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
- Bidang Transmigrasi Yang membawahi 3 (tiga) Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Pembangunan Kawasan Transmigrasi
- Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Perangkat
Daerah Pelaksana

O	/Kabupaten/Kota	Nama	h Personil (PNS)	Keterangan
.	ANSNAKER		ang	an Ketenagakerjaan
.	ANSNAKER	ai tidak Tetap (PPPK)	ng	an Ketenagakerjaan
.	ANSNAKER	ai Tidak Tetap (Paruh Waktu)	ng	an Ketenagakerjaan
.	ANSNAKER	ai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak)	g	an Ketenagakerjaan



Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Data keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 pada Sekretariat menurut jabatan berjumlah 21 (dua puluh satu) Orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai pada Sekretariat menurut Jabatan

No.	Jabatan	Formasi	Terisi	Belum Terisi	Ket.
1.	Eselon II	1 Orang	1 Orang	-	Kadis
2.	Eselon III	4 Orang	4 Orang	-	Sekretaris/ Kabid
3.	Eselon IV	11 Orang	7 Orang	-	Kasubbag
4.	Staf	9 Orang	6 Orang	2 Orang	Pelaksana
JUMLAH		22 Orang	15 Orang	2 Orang	

Data keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 pada Bidang Ketenagakerjaan menurut jabatan berjumlah 22 (dua puluh dua) formasi jabatan dengan kualifikasi sebagai berikut :



Data keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang menangani Urusan Wajib bukan pelayan dasar Ketenagakerjaan berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) orang dengan kualifikasi menurut tingkat pendidikan, pangkat dan golongan sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai pada Urusan Wajib
Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan**

NO	JENIS PENDIDIKAN	GOLONGAN													Jumlah
		II				III				IV					
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	
1	Magister (S2)	-	1	-	-	2	1	4	8	4	1	1	-	-	22
2	Sarjana (S1)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	Diploma IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Diploma III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SLTA/SMK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		1	-	-	-	2	1	4	8	4	1	1	-	-	22
KETERANGAN		- Memegang Jabatan 12 orang - Staf 6 orang - Fungsional 4 orang													



e. Realisasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan untuk tahun 2025 yaitu, pagu awal Rp. 7.596.411.000,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 4.399.554.050,- dan Belanja Modal sebesar Rp.189.099.850-

Pagu setelah perubahan berubah menjadi, pagu Rp. 7.320.554.088,00 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 6.099.454.238,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 221.099.850,00 Pada Tahun Anggaran 2025 realisasi anggaran yang telah dibelanjakan sebesar Rp. 6.780.248.836,- atau 92,61 %

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib :

	WAJIB	ANJAL TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			AL BELANJA	SI BELANJA (Rp. Juta)	ENTASE (%)	AMA SKPD PELAKSANA
			JA PEGAWAI	BARANG DAN JASA	JA MODAL				
	Anggaran	0.554.088	3.463.297.780	3.564.915.250	221.099.850	0.554.088	248.836	2,61	NSNAKER BARSEL

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan pilihan :

Berdasarkan DPA perubahan dan kegiatan urusan pilihan yaitu Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja dengan 2 (Dua) Program dan 6 (enam) kegiatan adalah pagu Rp. 494.021.500,- dengan realisasi Rp. 493.701.600,- atau 99,93 %.



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**Anggaran Belanja, Realisasi, dan
Pelaksana Urusan Pilihan**

	SARAN PILIHAN	BILA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			BELANJA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	TASE (%)	KPD PELAKSANA
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
	pekerjaan	0	0	0.		4.021.500	3.701.600	93 %	SNAKER BARSEL

Berdasarkan DPA perubahan dan kegiatan urusan pilihan yaitu Bidang Transmigrasian dengan 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan adalah pagu Rp.217.098.000,- dengan realisasi Rp. 212.372.608,- atau 87,09 %.

**Anggaran Belanja, Realisasi, dan
Pelaksana Urusan Pilihan**

	SARAN PILIHAN	BILA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG			BELANJA (Rp.)	REALISASI BELANJA (Rp.)	TASE (%)	KPD PELAKSANA
			PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL				
	transmigrasian	0	0	0	0	7.098.000	372.608	2,61	TRANSNAKER B. BARSEL

1) Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan kegiatan pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan dibuat dengan memperhatikan skala prioritas kegiatan antara lain keperluan kegiatan rutin dinas, program tahunan dinas, serta program prioritas yang berkaitan dengan program pembangunan daerah dan program Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA SKPD, RKA SKPD.



2) Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan

Kondisi gedung kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan sebagian besar dalam kondisi baik. Pada tahun 2025 telah diadakan perawatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Rehabilitasi Plafond, pengecatan dinding dan Wc Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Permasalahan dan Solusi

No	Permasalahan yang dihadapi	Solusi Pemecahan Masalah
A. Sekretariat		
1.	Keterbatasan/kekurangan pegawai (staf)	Mengusulkan penambahan pegawai/JFU (staf) untuk dapat membantu pelaksanaan tugas pekerjaan secara profesional sehingga organisasi dapat melayani masyarakat secara maksimal.
B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		
1.	Terbatasnya dana kegiatan sosialisasi bursa kerja ke perusahaan.	Kegiatan bursa kerja diinformasikan melalui surat-surat yang dikirimkan ke perusahaan perusahaan agar lowongan kerja yang tersedia dapat disampaikan ke Disnakertrans Kab. Barito Selatan.
2.	Belum terpenuhi seluruhnya permintaan masyarakat akan pelatihan keterampilan tenaga kerja karena keterbatasan Pagu Anggaran	Kerjasama dengan Balai Latihan Kerja mengenai permintaan masyarakat melalui hasil Musrembang, agar dapat terpenuhinya pelatihan keterampilan yang dibutuhkan.



C. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek

1.	Pelanggaran terhadap Norma Kerja, yaitu : a. Wajib Laporkan Ketenagakerjaan b. Hubungan Kerja meliputi perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, LKS Bipartit, dan Perselisihan Hubungan Industrial c. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat d. Kebijakan Penyimpangan Jam Kerja e. Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur f. Pengupahan g. Jamsostek h. Kebebasan Berserikat i. Tenaga Kerja Asing j. AKAD	Penanganan dalam segala hal terkait dengan pelanggaran Norma Kerja melalui : 1. Pelaksanaan mediasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi ke perusahaan agar memberikan ketenangan kerja yang dapat memberikan dampak positif terhadap usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja. 2. Menjamin penegakan ketentuan hukum mengenai kondisi dan perlindungan tenaga kerja mulai dari Tindakan Preventif sampai dengan tindakan represif.
----	--	--

Capaian Kinerja Urusan Wajib

	Bidang	Capaian Kinerja
--	--------	-----------------



	Sekretariat	- Terpenuhi Pelayanan Administrasi Perkantoran - Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Tercapainya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Meningkatnya Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah - Tercapainya Pengembangan Data dan Informasi
	Pelatihan dan Produktivitas	- Terpenuhi pelatihan bagi tenaga kerja/masyarakat - Terpenuhi pelayanan kartu antar kerja (AK.I) serta informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja,
	Hubungan Industrial dan Jamsostek	udnya penegakan hukum dan perlindungan tenaga kerja sesuai ketentuan undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

2. Urusan Pilihan Ketramigrasian

Satuan kerja perangkat daerah sebagai penyelenggara urusan pilihan atau Bidang Ketramigrasian ini adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan yang membawahi Bidang dan Seksi sebagai berikut:

1. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Penyelenggara Urusan Pilihan**

No.	KPD Kabupaten	Nama	Jumlah Personil	Keterangan
	DINAS	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2	Transmigrasi

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Data keadaan pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025 yang menangani Bidang Ketransmigrasian berjumlah 2 (dua) Orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

**Jumlah Pegawai pada
Bidang Transmigrasi Menurut Jabatan**

NO.	JABATAN	FORMASI	TERISI	BELUM TERISI	KET.
1.	Eselon II	-	-	-	
2.	Eselon III	1 Orang	1 Orang	-	
3.	Eselon IV	1 Orang	1 Orang	-	
4.	Staf	8 Orang	8 Orang	4 Orang	
JUMLAH		10 Orang	10 Orang	4 Orang	



Data keadaan Pegawai Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan yang menangani bidang Ketransmigrasian dirinci menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai pada Bidang Ketransmigrasian
Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan**

No.	Jenis Pendidikan	Golongan														Jumlah
		II				III				IV						
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e		
1	Magister (S2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Sarjana (S1)		-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	5	
3	Diploma IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Diploma III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	SLTA/SMK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	SD															
8	PPPK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
TOTAL		-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	4	
KETERANGAN		- Memegang Jabatan 2 orang - Fungsional 4 orang - PPPK I 4 orang														

1. 1. 2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Srategis Pemerintah Daerah

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat.



Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Oleh karena itu untuk merumuskan permasalahan strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pembangunan lima tahun terakhir serta berdasarkan kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Barito Selatan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi Barito Selatan saat ini, permasalahan pembangunan yang menjadi perhatian adalah :

1) Ketersediaan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai

Kabupaten Barito Selatan memiliki wilayah geografis yang dimana sebagian besar transportasi melewati alur sungai, sehingga pembangunan besar transportasi melewati alur sungai sehingga pembangunan daerah bidang sarana prasarana infrastruktur memiliki



berbagai kendala. Transportasi dari kecamatan ke ibukota kabupaten dan sebaiknya sebagian besar melewati sungai. Dimana hanya beberapa kecamatan yang bisa ditempuh lewat darat.

2) Belum maksimalnya sistem dan jaringan transportasi, komunikasi, dan informasi yang mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan sehingga memerlukan biaya operasional dan perawatan sarana prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan.

Karakteristik geomorfologi pembentukan wilayah Kabupaten Barito Selatan yang terdiri dari daerah rawa dan daerah aliran sungai, menyebabkan Kabupaten Barito Selatan membutuhkan transportasi antar modal yang memadukan antara transportasi darat dan sungai. Angkutan penyeberangan sebagai penghubung jaringan transportasi darat (jalan raya) dalam kerangka tatanan transportasi daerah berfungsi mempersatukan wilayah kabupaten yang terdiri dari beberapa sungai/anjir memegang peranan yang penting dan strategis. Selain itu, potensi sungai yang dapat dilayari sampai jauh ke pedalaman, khususnya mengangkut batu bara dan kayu melalui sungai dalam jumlah besar, sehingga potensi ini perlu dikembangkan sebagai alternatif jalan raya atau angkutan sungai, jauh lebih murah daripada angkutan jalan raya. Alat angkutan terdiri dari perahu, *speed boat*, perahu rumah, kapal sungai, bus air, dan truk air.



3) Masih terbatasnya insfrastruktur pengairan yang mendukung ketahanan pangan.

Pertanian merupakan sektor/sub-sektor yang memiliki laju pertumbuhan PDRB rata-rata relatif tinggi yaitu 2,60 persen. Oleh karena itu, ketersediaan dan operasional sarana irigasi teknis menjadi suatu kebutuhan untuk mendukung agar sektor pertanian terus dapat dipacu pertumbuhannya.

Apabila dikaitkan dengan ketersediaan air untuk irigasi, dapat dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Barito Selatan yang subur adalah wilayah yang berada di dekat aliran Sungai Barito. Wilayah Kabupaten Barito Selatan bagian utara kurang subur karena wilayah tersebut merupakan perbukitan bergelombang yang kedalaman tanahnya dangkal dan kekurangan air untuk mengairi tanam-tanaman.

Kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan untuk memanfaatkan danau yang ada merupakan salah satu cara menataguna air di Kabupaten Barito Selatan agar lahan di wilayah tersebut menjadi lebih produktif. Kebijakan pembuatan sumur bor juga merupakan salah satu cara mengatasi kekurangan air di wilayah tersebut sehingga lahan menjadi lebih produktif untuk tanaman perkebunan.

Kebijakan yang perlu diambil terkait dengan pengembangan kawasan pertanian adalah mempertahankan lahan pertanian yang



sudah ada, baik pertanian lahan basah maupun pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian umum diarahkan tersebar di bagian tengah Kabupaten Barito Selatan, yaitu Kecamatan Dusun Selatan, Kecamatan Karau Kuala dan Kecamatan Dusun Hilir. Dengan semakin tingginya perubahan fungsi tanah pertanian menjadi kawasan terbangun, maka untuk mempertahankan kawasan pertanian khususnya sawah beririgasi teknis dan lahan abadi pertanian pangan (sawah abadi) ini perlu ditingkatkan intensifikasinya. Untuk menunjang peningkatan dari nilai manfaat melalui peningkatan pelayanan irigasi dari setengah teknis menjadi teknis dan sederhana menjadi setengah teknis. Pengembangan sawah selain padi juga dilakukan penerapan sistem mina padi, tumpang sari dan sebagainya.

4) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi untuk masyarakat

Berbagai sumber energi yang dimiliki oleh Masyarakat Barito Selatan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan pemanfaatan sumber energi listrik yang hingga saat ini hanya bisa dinikmati oleh warga diperkotaan sementara untuk wilayah pedalaman/pedesaan belum seluruhnya mampu menikmati fasilitas listrik.



5) Sarana Air Bersih

Ketersediaan air disamping untuk kepentingan pertanian, juga sangat diperlukan dan menjadi kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan air bersih di Kabupaten Barito Selatan sampai saat ini sudah terpenuhi dengan baik, namun pemerintah tetap terus berupaya untuk mencari alternatif lain dalam pemenuhan akan air bersih dimasa yang akan datang.

6) Persampahan

Sumber utama timbunan sampah di kawasan perkotaan yaitu sampah domestik (rumah tangga) dan sampah non domestik meliputi sampah institusional (sekolah, kantor, dll) sampah komersial (pasar, toko, dll), sampah aktivitas perkotaan (penyapuan jalan, lapangan, dll), sampah klinik, sampah industri, sampah konstruksi dan lain sebagainya. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Barito Selatan dikelola langsung oleh masyarakat secara perorangan atau berkelompok. Secara perorangan sampahnya dikelola dengan cara membakar, menanam, ataupun mengupah seseorang dengan peralatan angkutnya untuk membuang sampah ketempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Untuk kebutuhan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten sudah menyediakan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di berbagai titik di dalam kota maupun luar kota. Penyediaan petugas seperti penyapu jalan,



pengangkut sampah dan pembersih saluran/got sudah pula disediakan oleh pemerintah beserta prasarana transportasi seperti pick up dan truk sampah.

7) Masih rendahnya kapasitas ekonomi daerah

Permasalahan pemerataan pergerakan ekonomi menjadi penghambat utama perkembangan wilayah suatu daerah. Hal ini dikarenakan produktivitas setiap wilayah akan mengalami ketimpangan yang menyebabkan secara komulatif pembangunan daerah berjalan tidak seimbang. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus selalu memberi perhatian lebih terhadap wilayah-wilayah yang masih memiliki kesulitan pergerakan perekonomiannya. Ekonomi Barito Selatan kurun waktu 5 (lima) tahun relatif rendah berada di bawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan di antara kabupaten/kota secara keseluruhan berkisar antara 5 -6 persen.

8) Belum optimalnya pengelolaan SDA Barito Selatan

Disebutkan bahwa kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Barito Selatan adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan diikuti pertambangan dan penggalian. Meskipun memberi kontribusi yang besar namun dengan luas wilayah Kabupaten Barito Selatan



adalah 702.009,90 hektar, SDA belum sepenuhnya optimal dimanfaatkan.

9) Ekonomi masyarakat belum diberdayakan secara optimal

Permasalahan ekonomi masyarakat yang belum diberdayakan secara optimal dapat dilihat dari :

a) Pola pengeluaran konsumsi masyarakat

Jika persentase pengeluaran untuk non makanan semakin tinggi, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan, begitu pula sebaliknya.

b) Penghimpunan dana perbankan

Sebagaimana kita ketahui bahwa besarnya penyaluran kredit perbankan menjadi indikator kebutuhan dana bagi semua sektor usaha yang penggunaannya akan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya penyaluran kredit untuk sektor UMKM yang menjadi bagian terbesar dari aktivitas ekonomi masyarakat.

Permasalahan dalam bidang ekonomi lainnya antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, pengembangan tata niaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi.



c) Kemampuan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dapat dilihat melalui beberapa parameter untuk menilai kemampuan fiskal yaitu Indeks Kapasitas Fiskal (IKF), Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). IKF adalah indeks kemampuan keuangan melalui APBD untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) adalah penjumlahan PAD, DAU, DBH, DAK, Transfer Provinsi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah, dikurangi Belanja Pegawai yang dibagi dengan Jumlah Penduduk Miskin. Tingkat Ketergantungan Daerah (TKtD) adalah rasio antara Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) dan Total Pendapatan Daerah.

Rasio ini mengukur kontribusi keuangan pusat terhadap pengembangan daerah. PDRB digunakan untuk melihat *size* ekonomi daerah. PDRB yang besar mengindikasikan bahwa jumlah nilai barang dan jasa akhir semua unit dari daerah tersebut adalah besar.

10) Masalah Sumber Daya Manusia



Sebagian besar penduduk Barito Selatan bermukim di kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan umumnya dicirikan oleh lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal, antara lain rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, terbatasnya infrastruktur terbatas, akses kesehatan, minimnya akses pendidikan, masih tingginya tingkat kemiskinan, dan rendahnya kualitas lingkungan permukiman perdesaan. Lemahnya daya dukung dan kualitas SDM lokal akan menentukan daya saing yang akan mempengaruhi pembangunan kesejahteraan masyarakat

Beberapa isu terkait lemahnya daya dukung dan kualitas SDM perdesaan tersebut, antara lain (1) rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; (2) masih tingginya jumlah desa tertinggal dengan kondisi terbatas bidang infrastruktur, akses pendidikan, akses kesehatan, perekonomian rakyat yang belum berkembang serta kelembagaan desa dan kelembagaan masyarakat yang masih rendah.

Sumberdaya manusia kesehatan menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Selatan masih kekurangan tenaga kesehatan. Masih kekurangan dokter umum, dokter gigi, perawat, dan bidan. Kekurangan tenaga kesehatan itu khusus untuk wilayah kecamatan. Kalau di Kota Buntok sudah cukup. Ada beberapa puskesmas di kecamatan yang masih kekurangan dua tenaga dokter yakni dokter umum dan dokter gigi



serta satu orang perawat. Kalau untuk desa, tenaga kesehatannya masih kekurangan bidan.

11) Masalah Pertanian

Di bidang pertanian dihadapkan pada rendahnya daya saing dan nilai-nilai produk-produk pertanian dan masih ketergantungan terhadap import pangan dan peningkatan keragaman pengolahan produk pertanian yang mempunyai nilai jual yang kompetitif. Walaupun memiliki beragam hewan ternak, secara umum Kabupaten Barito Selatan mengalami produksi perternakan masih sangat terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan dan kebutuhan konsumsi.

Perkebunan karet yang luas dan produktif saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Kapasitas terpakai industri pengolahan getah karet baru mencapai 60%. Hal ini karena bahan baku masih banyak dijual ke Banjarmasin karena adanya persaingan harga. Jenis tanaman yang mempunyai potensi sebagai produk unggulan di wilayah Kabupaten Barito Selatan adalah :

- a) Budidaya tanaman kopi (GB.Awai, Dusun Selatan).
- b) Budidaya tanaman kelapa (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- c) Budidaya tanaman jagung (seluruh kecamatan terutama GB.Awai).
- d) Budidaya tanaman karet (Dusun Utara, Dusun Selatan, Karau Kuala dan GB. Awai).



e) Budidaya tanaman kelapa sawit (Dusun Utara, Dusun Selatan, dan GB. Awai).

Perairan Umum, Kabupaten Barito Selatan memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan panjang 900 km, di daerah aliran sungai tersebut bermuara anak-anak sungai serta terdapat danau (besar-kecil) dan rawa-rawa, kawasan ini mempunyai potensi untuk perikanan budidaya, tangkap dan daerah konservasi serta dapat pula menjadi bisnis agrowisata seperti di Danau Sababilah.

12) **Belum optimalnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik**

Dalam usaha mencapai reformasi birokrasi pemerintah daerah yang optimal terutama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting yang meliputi : *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Tanpa empat elemen tersebut, sulit sekali untuk menjamin bahwa pembangunan daerah diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan yang belum terwujud, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain : belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; pelayanan publik yang belum berkualitas; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan.



b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah diatur bahwa yang dimaksud dengan Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi yang dirumuskan untuk Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Visi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat Pilkada.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Selatan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Selatan yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006-2026 adalah

“Barito Selatan yang Maju, Mandiri dan Profesional yang Beriman dan Bertaqwa”.



Melalui sinkronisasi dan harmonisasi dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 maka Misi RPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 adalah ;

MISI 1 : Mempercepat Pengembangan Dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Yang Produktif, Kreatif Dan Berwawasan Lingkungan.

MISI 2 : Memperkuat Ketahanan Daerah Dan Kondisi Politik, Meningkatkan Pelayanan Sosial, Permukiman Dan Mengantisipasi Perubahan Global.

MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi

MISI 4 : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing.

MISI 5 : Mewujudkan Bارسel Yang Beriman, Berbudaya Dan Berkesetaraan Gender Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya menjalankan tugas dalam misi 3 (tiga) yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Profesionalisme Pegawai Yang Efektif, Efisien dan Reformasi Birokrasi". Berdasarkan rumusan isu-isu strategis seperti diuraikan pada bab sebelumnya dan tugas serta fungsi yang diemban Dinas



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan untuk periode 2023-2026 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu "Terwujudnya tata :

- 1) kelola pemerintahan yang akuntabel". Untuk mencapai tujuan tersebut ditentukan 3 (tiga) sasarannya itu : Meningkatnya akuntabilitas perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah;
- 2) Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan
- 3) Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan

C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Masih dalam Proses Belum Dibuat Dokumennya

d. Program Peningkatan Kerukunan Hidup Beragama, Sosial dan Budaya Yang Lestari

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 6 (enam) program pelaksanaan berupa :

- 1) Menyediakan sarana prasarana ibadah, tenaga kerohanian dalam rangka pengamalan agama.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sosial budaya.
- 3) Meningkatkan budaya gotong royong masyarakat.



- 4) Menata kelestarian alam hulu dan nilir serta penanggulangan bencana alam.
- 5) Melestarikan adat istiadat dengan memugar cagar-cagar budaya dan tempat bersejarah.
- 6) Membina organisasi kemasyarakatan, keagamaan, sosial politik dan kelompok seni budaya dan pembinaan suku terasing.

e. Program Pengelolaan Tata Pemerintahan Yang Baik.

Untuk pencapaian strategi di atas, disusun 4 (empat) program pelaksanaan berupa :

- 1) Rekrutmen dan penempatan aparatur pemerintah daerah yang merata sesuai kemampuan dan kebutuhan daerah.
- 2) Pelayanan yang cepat, ramah dan mudah bagi masyarakat yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 3) Mendukung dan mendorong inovasi dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
- 4) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam memberikan peluang investasi.

**f. Kegiatan Pembangunan Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Tahunan**

Bahwa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Bupati Barito



Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 - 2026. RPD merupakan penjabaran dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten dan memperhatikan RPJMD Provinsi serta RPJMN.

Program dan Kegiatan prioritas pelaksanaan Rencana Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan tahun 2023 - 2026 merupakan program dan kegiatan prioritas.

Kemudian secara lengkap pada bagian ini disajikan Kegiatan Pembangunan Tahun 2025 per Urusan sebagaimana berikut ini :

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan

Urusan Wajib non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan. Pada tahun 2025 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan telah menetapkan 6 (Enam) Program dan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Tabel I.3 Anggaran Belanja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Belanja	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Rasio	Realisasi 2023
	Rp	Rp	%	Rp
Belanja Pegawai	6.099.454.238,00	7.187.110.143,00	92,41	5.452.398.783.00
Belanja Modal	221.099.850,00	1.049.290.000,00	99,32	369.655.980.00
Jumlah	9.698.263.549,00	8.236.400.143,00	92,61	5.822.054.683,00

Perubahan anggaran Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan secara rinci disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel I. 4 Urusan Wajib non Pelayanan Dasar Ketenagakerjaan TA. 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.182.715.538	4.667.305.078	90,05
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.095.758	47.120.351	94,06
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.875.000	98,75
	2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.385.758	4.335.750	98,86
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.940.000	14.724.301	98,56
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.500.000	7.458.000	99,44
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	13.270.000	10.727.300	80,84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.627.432.780	3.155.027.086	86,97
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.463.297.780	2.995.733.586	86,50
	2. Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	5.500.000	5.500.000	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	158.635.000	153.793.500	96,95
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	28.140.750	27.120.750	96,38
	1. Penatausahaan barang milik Daerah pada perangkat	28.140.750	27.120.750	96,38



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Daerah				
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	88.651.000	88.651.000	100
	1. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	29.460.000	29.460.000	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	59.191.000	59.191.000	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.879.600	447.458.170	99,46
	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38.969.000	38.965.400	99,99
	2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.524.600	48.522.800	100
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	125.950.000	124.450.000	98,81
	4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.436.000	223.519.970	99,59
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.779.850	220.280.000	100
	7. Pengadaan Aset tetap lainnya	221.779.850	323.530.869	100
7.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	436.755.800	405.294.071	92,79
	1. Penyediaan Jasa Kominikasi, sumber Daya Air dan Listrik	85.825.800	75.214.071	87,64
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.930.000	330.080.000	94,06
8.	Pemeliharaan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	279.980.000	276.353.650	98,70
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.990.000	39.983.650	99,98
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (honorarium Pengadaan barang dan jasa)	220.680.000	220.680.000	99,97
	3. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasaran gedung kantor dan bangunan lainnya	19.310.000	15.690.000	81,25
II.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.532.000	55.532.000	100
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	55.532.000	55.532.000	100
	1. Penyusunan rencana Tenaga kerja makro	33.285.000	33.285.000	100
	2. Penyusunan rencana Tenaga kerja mikro	22.247.000	22.247.000	100
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	221.700.500	221.515.000	99,91
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	205.983.500	205.866.600	99,94
	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	169.471.500	169.435.300	99,98
	2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	36.512.000	36.431.300	99,78



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



2.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
	1. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.169.000	102.136.100	99,96
1.	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/kota	15.015.000	15.015.000	100
	1. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15.015.000	15.015.000	100
2.	Pengelolaan informasi pasar kerja	87.154.000	87.121.100	99,96
	1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	14.382.500	14.372.100	99,93
	2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	61.711.500	61.689.000	99,96
	3. Job Fair / Bursa Kerja	11.060.000	11.060.000	100

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3.	Perlindungan pra dan Purna penanganan di Daerah Kabupaten/kota	11.749.000	11.749.000	100,00
	1. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calo Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	11.749.000	11.749.000	100,00
V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.529.590.050	1.302.128.140	85,12
1.	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.327.770.200	1.323.247.500	99,65
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.555.000	10.217.000	98,80
	2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	11.856.500	11.855.900	99,99
	3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.305.358.700	1.301.175.500	99,68
2.	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/kota	201.819.850	188.042.350	93,17
	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.322.250	36.313.550	99,98
	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.741.500	31.741.100	100
	3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afliasi	30.260.000	30.260.000	100
	4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	8.303.300	8.303.300	100
	5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja.	95.192.800	81.424.400	85,54
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	217.098.000	212.372.608	97,82

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



1.	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	217.098.000	212.372.608	87,09
	1. Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	194.878.000	190.154.408	97,58
	2. Penguatan Infrastruktur sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	22.220.000	22.218.200	99,99
JUMLAH		7.320.554.564	6.780.248.836	92,61

Urusan Pilihan Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja

Yang menjadi urusan pilihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan adalah urusan Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja yaitu terdiri dari 3 (tiga) program dan 6 (enam) kegiatan.

Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

URUSAN PILIHAN (PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA)

II.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.532.000	55.532.000	100
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	55.532.000	55.532.000	100
	1. Penyusunan rencana Tenaga kerja makro	33.285.000	33.285.000	100
	2. Penyusunan rencana Tenaga kerja mikro	22.247.000	22.247.000	100
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	221.700.500	221.515.000	99,91
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	205.983.500	205.866.600	99,94
	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetisi	169.471.500	169.435.300	99,98
	2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	36.512.000	36.431.300	99,78
2.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
	1. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.169.000	102.136.100	99,96
1.	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/kota	15.015.000	15.015.000	100
	1. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15.015.000	15.015.000	100



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



2.	Pengelolaan informasi pasar kerja	87.154.000	87.121.100	99,96
	1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	14.382.500	14.372.100	99,93
	2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	61.711.500	61.689.000	99,96
	3. Job Fair / Bursa Kerja	11.060.000	11.060.000	100
NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3.	Perlindungan pra dan Purna penanganan di Daerah Kabupaten/kota	11.749.000	11.749.000	100,00
	1. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calo Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	11.749.000	11.749.000	100,00

Urusan Pilihan Hubungan Industrial dan Jamsostek

Yang menjadi urusan pilihan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan adalah urusan Hubungan Industrial dan Jamsostek yaitu terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

Program dan Kegiatan Urusan Pilihan

URUSAN PILIHAN (HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK)

V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.529.590.050	1.302.128.140	85,12
1.	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	1.327.770.200	1.323.247.500	99,65
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.555.000	10.217.000	98,80
	2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	11.856.500	11.855.900	99,99
	3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.305.358.700	1.301.175.500	99,68
2.	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/kota	201.819.850	188.042.350	93,17
	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.322.250	36.313.550	99,98
	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.741.500	31.741.100	100



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	30.260.000	30.260.000	100
4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	8.303.300	8.303.300	100
5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.	95.192.800	81.424.400	85,54

Urusan Pilihan Ketransmigrasian

Yang menjadi urusan pilihan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan adalah urusan Ketransmigrasian yaitu terdiri dari 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan.

**Program dan Kegiatan
Urusan Pilihan**

URUSAN PILIHAN (TRANSMIGRASI)

VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	217.098.000	212.372.608	97,82
1.	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	217.098.000	212.372.608	87,09
	1. Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	194.878.000	190.154.408	97,58
	2. Penguatan Infrastruktur sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	22.220.000	22.218.200	99,99
JUMLAH		7.320.554.564	6.780.248.836	92,61



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2. 1. Capaian Kinerja Makro.

No	Indikator Kinerja makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,36	71,74
2.	Angka Kemiskinan	4,83	4,88
3.	Angka Pengangguran	4,12	2,04
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,70	4,70
5.	Pendapatan Perkapita	65,48	33.375.000
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)		

**Sumber Data dari BPS Barito Selatan "Barito Selatan Dalam Angka Tahun 2025"*



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



2. 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

No.	Urusan Pemerintahan	IKK Keluaran		Capaian Kinerja	Sumber Data	
1.	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota	1	Persentase Kabupaten/kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten Kota Menyusun Rencana Tenaga Kerja}}{\text{Jumlah Kabupaten Kota}} \times 100\%$ Masih belum tersedia Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja dikarenakan masih dalam Tahap Penyusunan Dokumen RTKD Kabupaten Barito Selatan yang akan Rilis di Bulan April 2024	Disnakertans	Dib der dul
		2	Persentase Perusahaan yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{\text{Jumlah Perusahaan yang Telah Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak}}{\text{Jumlah Perusahaan}} \times 100\%$	Disnakertans Dpmptsp	sda
		3	Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.	$\frac{\text{Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota}}{\text{Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$	Disnakertans	sda



2. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Analisis tersebut meliputi keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi serta misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Dalam analisis ini dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi/data yang diperoleh secara lengkap dan akurat dan bila memungkinkan dilakukan evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketetapan dan efektivitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem proses pelaksanaannya.

Analisis ini dimaksud pula untuk menghindari kegiatan atau program yang tidak memiliki relevansi yang tepat dengan tujuan atau sasaran yang ditetapkan, sehingga kesulitan mengukur capaian keberhasilan atau kegagalan visi dan misi bisa dihindari.

Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui analisis pengukuran kinerja atau analisis atas capaian sasaran strategis. Pengukuran sebuah



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

instansi pemerintah terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan.

a. Target kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	Kriteria	B
2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Tingkat Pengangguran	Persen	4,85
3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	Produktivitas Total Daerah	Juta Rupiah	133,24
		Persentase Wirausaha Muda	Persen	48,00

b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan baik terhadap kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan kelompok indikator kinerja (Input, Output dan Outcome) menurut rencana dan realisasi. Hasil perbandingan dibuat



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



dalam prosentase realisasi dari rencana melalui Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025.

Sedangkan pengukuran kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasinya. Hasil perbandingan dibuatkan dalam bentuk persentase melalui Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2025.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2025 dan Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2025, dapat diuraikan capaian Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025, sebagaimana diuraikan dalam analisis atas pencapaian sasaran strategis tahun 2025 berikut ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	B	*)	*)
2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Tingkat Pengangguran	4,85	4,30	88,65
3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	Produktivitas Total Daerah	133,24	85,12	63,88
		Persentase Wirausaha Muda	48,00	40,36	84,08

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target
Perjanjian Kinerja.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP Disnakertrans	CC	CC	100,00	B	B	100,00	B	*)	*)
2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Tingkat Pengangguran	5,01	4,33	86,43	4,93	4,12	83,57	4,85	4,30	88,65
3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	Produktivitas Total Daerah	129,34	125,05	96,68	131,28	90,11*)	68,64	133,24	85,12	63,88
		Persentase Wirausaha Muda	41,00	39,61	96,60	45,00	40,36	89,69	48,00	40,36	84,08

d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target RPD/ Renstra	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	B	-*)	-*)
2	Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan	Tingkat Pengangguran	4,85	4,30	88,65
3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan, keluarga dan ketenagakerjaan	Produktivitas Total Daerah	133,24	85,12	63,88
		Persentase Wirausaha Muda	48,00	40,36	84,08

e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

No	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi	
					(Rp)	(%)
1	Nilai SAKIP DISNAKERTRANS	5.182.715.538	4.667.305.078	-*)	83.890.188	1,62
2	Tingkat Pengangguran	102.169.000	88.655.500	4,30	92.751.000	189
3	Produktivitas Total Daerah	1.751.290.550	1.302.128.140	85,12	1,735.573.550	41,22
4	Persentase Wirausaha Muda	217.098.000	212.372.608	40,36	30.782.000	9,57
Jumlah		7.320.554.088,00	6.561.207.326	89,62	484.558.072	6,37

f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.182.715.538	4.667.305.078	90,05
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.095.758	47.120.351	94,06
	3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	9.875.000	98,75

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.385.750	4.385.750	98,86
	3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.940.000	14.724.301	98,56
	4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	7.500.000	7.458.000	99,44
	5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	13.270.000	10.727.300	80,84
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.627.432.780	3.155.027.086	86,97
	1. Penediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.463.297.780	2.995.733.586	86,50
	2. Koordinasi Pelaksanaan Akutansi SKPD	5.500.000	5.500.000	100
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	158.635.000	153.793.500	96,95
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	28.140.750	27.120.750	96,38
	2. Penatausahaan barang milik Daerah pada perangkat Daerah	28.140.750	27.120.750	96,38

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	88.651.000	88.651.000	100
	2. Pengadaan pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	29.460.000	29.460.000	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	59.191.000	59.191.000	100
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.879.600	447.458.170	99,46
	1. Penediaan peralatan dan perlengkapan kantor	38.969.000	38.965.400	99,99
	2. Penediaan Peralatan Rumah Tangga	48.524.600	48.522.800	100
	3. Penediaan Bahan Logistik Kantor	125.950.000	124.450.000	98,81
	4. Penediaan barang cetakan dan penggandaan	6.000.000	6.000.000	100
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224.436.000	223.519.970	99,59
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	221.779.850	220.280.000	100
	7. Pengadaan Aset tetap lainnya	221.779.850	323.530.869	100
7.	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	436.755.800	405.294.071	92,79
	1. Penyediaan Jasa Kominikasi, sumber Daya Air dan Listrik	85.825.800	75.214.071	87,64
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.930.000	330.080.000	94,06
8.	Pemeliharaan Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	279.980.000	276.353.650	98,70
	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.990.000	39.983.650	99,98
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (honorarium Pengadaan barang dan jasa)	220.680.000	220.680.000	99,97
	3. Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasaran gedung kantor dan bangunan lainnya	19.310.000	15.690.000	81,25
II.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	55.532.000	55.532.000	100

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

1.	Penvusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	55.532.000	55.532.000	100
	1. Penyusunan rencana Tenaga kerja makro	33.285.000	33.285.000	100
	2. Penyusunan rencana Tenaga kerja mikro	22.247.000	22.247.000	100
III.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	221.700.500	221.515.000	99,91
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi	205.983.500	205.866.600	99,94
	1. Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	169.471.500	169.435.300	99,98
	2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur Serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	36.512.000	36.431.300	99,78
2.	Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
	1. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	15.717.000	15.648.400	99,56
IV.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	102.169.000	102.136.100	99,96
1.	Pelayanan antar kerja di daerah Kabupaten/kota	15.015.000	15.015.000	100
	1. Penyelenggaraan Unit Pelayanan Disabilitas Ketenagakerjaan	15.015.000	15.015.000	100
2.	Pengelolaan informasi pasar kerja	87.154.000	87.121.100	99,96
	1. Pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar kerja online	14.382.500	14.372.100	99,93
	2. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	61.711.500	61.689.000	99,96
	3. Job Fair / Bursa Kerja	11.060.000	11.060.000	100

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3.	Perlindungan pra dan Purna penanganan di Daerah Kabupaten/kota	11.749.000	11.749.000	100,00
	1. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi calo Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	11.749.000	11.749.000	100,00
V.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.529.590.050	1.302.128.140	85,12
1.	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerjasama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	1.327.770.200	1.323.247.500	99,65
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	10.555.000	10.217.000	98,80
	2. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	11.856.500	11.855.900	99,99
	3. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.305.358.700	1.301.175.500	99,68
2.	Pencegahan dan Penyelesaian perselisihan HI, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/kota	201.819.850	188.042.350	93,17
	1. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.322.250	36.313.550	99,98
	2. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.741.500	31.741.100	100

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**

	3. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afliasi	30.260.000	30.260.000	100
	4. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	8.303.300	8.303.300	100
	5. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja	95.192.800	81.424.400	85,54
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	217.098.000	212.372.608	97,82
1.	Pengembangan satuan pemukiman pada tahap kemandirian	217.098.000	212.372.608	87,09
	1. Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	194.878.000	190.154.408	97,58
	2. Penguatan Infrastruktur sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	22.220.000	22.218.200	99,99
JUMLAH		7.320.554.564	6.780.248.836	92,61

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tidak melaksanakan tugas pembantuan Baik dari Pusat, Provinsi maupun dari Daerah.



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan tidak melaksanakan dan mempunyai Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).



BAB V PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan serta tugas umum pemerintahan. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025



**DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BARITO SELATAN**



Buntok, Pebruari 2025
Plt. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Kabupaten Barito Selatan,

YOGA PRASETIANTO UTOMO, S.STP, MM

PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

NIP. 19780523 1996121 005

